1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari	
	<ul> <li>a. DPR dan DPD</li> <li>b. DPR dan DPRD</li> <li>c. DPRD dan DPD</li> <li>d. MA dan MK</li> <li>e. KY dan MA</li> </ul>	
	Pembahasan	
	Jawaban : a	
2.	Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Siapakah yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD ?	
	<ul><li>a. DPR</li><li>b. MPR</li><li>c. Presiden</li><li>d. MK</li><li>e. MA</li></ul>	
	Pembahasan	
	Jawaban : b	
	Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 : Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang- undang Dasar.	
3.	Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.	
	<ul><li>a. 7</li><li>b. 30</li><li>c. 60</li><li>d. 90</li><li>e. 100</li></ul>	
	Pembahasan Jawaban : c	

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 : Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

- 4. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan sementara akan dilakukan oleh ...
  - a. MPR
  - b. DPR
  - c. Semua Menteri
  - d. Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan
  - e. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perekonomian

#### Pembahasan

#### Jawaban: d

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

- 5. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Hal tersebut tencantum dalam UUD 1945 pada ...
  - a. Pasal 9
  - b. Pasal 10
  - c. Pasal 12
  - d. Pasal 14
  - e. Pasal 15

#### Pembahasan

## Jawaban: b

Pasal 10 UUD 1945 : Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

6.	Untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan
	negara lain, Presiden membutuhkan persetujuan

- a. MPR
- b. Wakil Presiden
- c. MA
- d. MK
- e. DPR

#### Pembahasan

## Jawaban: e

Pasal 11 UUD 1945 : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

7. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan ...

- a. MPR
- b. MA
- c. DPR
- d. MK
- e. KY

#### Pembahasan

#### Jawaban: c

Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 : Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ...

- a. MK
- b. MA
- c. DPR
- d. KY
- e. MPR

## Pembahasan

#### Jawaban: b

Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah agung.

- 9. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan ....
  - a. MPR
  - b. KY
  - c. MK
  - d. DPR
  - e. MA

#### Pembahasan

# Jawaban: d

Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 : Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

- 10. Dewan Pertimbangan Agung (BAB IV) dihapus dari UUD 1945 pada amandemen ...
  - a. I
  - b. II
  - c. III
  - d. IV
  - e. IV

#### Pembahasan

## Jawaban: d

Dewan Pertimbangan Agung (BAB IV) dihapus dari UUD 1945 pada amandemen keempat.